

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia sebagai modal intelektual dan modal teknologi yang sangat diperlukan untuk membangun masyarakat berbasis pengetahuan, demikian juga dengan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dimana visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah melaksanakan pendidikan yang tuntas dan berkualitas bagi semua. Pendidikan yang memiliki kualitas tinggi dapat menjadi suatu kekuatan dalam meningkatkan daya saing bangsa karena kemampuannya melakukan perubahan perilaku masyarakat kearah yang lebih berbudaya, cerdas dan memiliki keterampilan hidup.

Dalam organisasi tata kelola memegang peranan penting agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Di dalam dunia pendidikan tata kelola yang baik akan berdampak positif terhadap mutu pendidikan. Pelaksanaan tata Kelola yang baik memerlukan koordinasi dari semua pihak. Tata kelola pendidikan menjadi salah satu manajemen pendidikan yang dapat merubah tatanan kehidupan sekolah. Makin baik tatanan kehidupan sekolah yang merupakan pengejawantahan dari tata kelola pendidikan akan berdampak pada peningkatan layanan pendidikan.

Beberapa penelitian menyebutkan adanya beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap tata kelola yaitu penerimaan peserta didik baru (PPDB), pembiayaan, pelatihan, kepemimpinan transformasional, jejaring, kompetensi sumberdaya manusia dan kinerja.

Berdasarkan kondisi faktual yang ada di lapangan ada beberapa kondisi yang masih menjadi permasalahan dalam tata kelola yang kerap muncul di antaranya:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) permasalahan yang muncul setiap tahunnya saat penyelenggaraan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK salah satunya sistem penerimaan siswa baru berdasarkan zonasi dengan mempertimbangkan usia siswa.

Keluhan masyarakat masih menuntut menghilangkan diskriminasi pada siswa yang usianya belum mencapai ketentuan dengan potensi kompetensi siswa. Mereka

menuntut agar anak mereka yang mempunyai kemampuan lebih atau kompetensi tinggi diperbolehkan masuk sekolah tertentu atau masuk sekolah negeri unggulan/ favorit walaupun di luar jalur zonasi dan belum mencapai umur yang ditetapkan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut yang menandakan adanya kelemahan tata kelola pendidikan yang dapat berdampak negatif pada kegiatan pendidikan di tingkat satuan Pendidikan.

Ada juga keluhan yang merasa bahwa PPDB yang dilaksanakan tidak obyektif khususnya dalam pelayanan pemilihan sekolah yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat berlomba lomba ingin menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan/ favorit dengan berbagai cara baik melalui peningkatan kemampuan anaknya pada sekolah agar nilai rapor dan nilai ujian akhirnya tinggi. Usaha lain yang lebih memperhatikan adalah orang tua siswa berusaha agar anaknya bisa masuk sekolah dengan melanggar integritas yang penting anaknya bisa sekolah di sekolah unggulan walaupun tempatnya jauh. Di satu sisi, anak orang yang tidak mampu secara ekonomi apalagi anaknya kurang mampu secara akademik maka sangat kecil kemungkinan bisa di terima di sekolah yang dianggap unggulan/ favorit walaupun letak sekolah tersebut ada di dekat rumahnya. Kebijakan zonasi pendidikan juga masih mengalami kendala dalam mengatasi problematika pendidikan yang semuanya diakibatkan oleh kelemahan dalam tata kelola pendidikan. Jikalau tata kelola pendidikan mengikuti prinsip tata kelola yang baik, maka kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan dapat dikurangi.

Dalam tata kelola pendidikan yang berkaitan dengan akses pelayanan pendidikan, masalah dan kelemahan tata kelola pendidikan yang berkeadilan antara lain disebabkan oleh kesenjangan pendidikan antar sekolah, kualitas dan kuantitas sekolah yang belum merata, pelayanan pendidikan yang kurang baik (Direktorat Pendidikan SMA, 2019).

Dengan adanya plus minus sistem zonasi ini menimbulkan dua sisi positif dan negatif. Sisi positifnya adalah siswa dengan nilai kurang mencukupi standar untuk SMA yang dianggap unggulan/ favorit, bisa masuk sekolah tersebut asal jarak rumah mereka dekat dengan sekolah. Sementara itu, siswa yang merasa tidak beruntung adalah mereka yang sudah mempersiapkan diri dengan nilai tinggi tidak bisa masuk sekolah yang dianggap unggulan/ favorit karena letak tempat tinggalnya di luar zona

dan kehabisan kuota pada jalur prestasi.

2. Pembiayaan

Sekolah sebagai organisasi atau lembaga, terdiri atas unsur fisik dan nonfisik yang membangun di dalamnya. Unsur fisik dalam lembaga berupa bangunan, sarana dan prasarana pembelajaran, sedangkan unsur nonfisik adalah berupa pengembangan sumber daya organisasi. Subandono (2011) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang handal tidak lepas dari pengaruh pola kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan berperan dalam menggerakkan segala sumber daya dalam organisasi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Tata kelola pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan pembiayaan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Cook (2009) biaya pendidikan adalah sumber yang digunakan untuk kualitas pendidikan yang diberikan sebagai umpan balik informasi berkelanjutan. Dengan sumber dana yang diperoleh baik dari pemerintah pusat (BOS) dan dari pemerintah daerah (BOP) yang *unit cost* (biaya satuan pendidikan) setiap peserta didik sama di setiap sekolah tetapi layanannya yang berbeda-beda. Ada sekolah yang kualitasnya baik salah satunya masyarakat melihat dari tingginya keterserapan di Perguruan Tinggi dan ada sekolah yang keterserapan di Perguruan Tingginya rendah. Dalam hal sarana prasarana ada sekolah yang sarana prasarananya baik sehingga kebutuhan terhadap sarana prasarananya terpenuhi, ada sekolah yang belum terpenuhi. Salah satu yang dapat dilihat adalah tampilan fisik sekolah dan kelengkapan prasarana yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan tata kelola.

3. Pelatihan

Menurut teori Roger dan Caple (2017) pelatihan adalah upaya sistematis dan terencana untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan/ keterampilan/ sikap melalui pengalaman belajar dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja kegiatan atau berbagai kegiatan. Pelatihan yang dilaksanakan untuk kepala sekolah agar memiliki kemampuan manajerial yang dapat menjadi lokomotif dan kekuatan untuk membimbing menjadi contoh serta menggerakkan para pendidik dan tenaga kependidikan serta stakeholder sekolah dalam mencapai tujuan organisasi.

Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah memiliki peran dominan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dituntut untuk memiliki kriteria tertentu

guna mencapai kepemimpinan yang efektif.

Kepemimpinan kepala sekolah dalam membimbing guru searah dengan pengembangan kompetensi guru. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang baik akan meningkatkan minat guru dalam melaksanakan kegiatan sekolah dan menciptakan kepuasan mengajar pada guru.

Namun kenyataannya, layanan pendidikan di sekolah juga masih berbeda-beda sehingga capaian di sekolah berbeda-beda. Karena capaian di sekolah berbeda-beda, maka minat masyarakatpun hanya ingin menyekolahkan anaknya pada sekolah yang capaian-capaian sekolahnya dianggap unggulan/ favorit. Hal ini menandakan masih adanya kelemahan dalam tata kelola.

4. Kepemimpinan Transformasional

Berdasarkan teori Bass dan Avolio (2011), kepemimpinan transformasional merupakan proses yang mempengaruhi orang/anggota organisasi dengan memperhatikan 5 (lima) kriteria yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual.

Dalam melaksanakan perannya Kepala sekolah berperan sebagai tokoh kunci pengelolaan sekolah sehingga kepala sekolah dituntut memiliki visi dan wawasan yang luas tentang kemampuan profesional yang memadai dalam bidang perencanaan, kepemimpinan, manajerial, dan supervisi bidang pendidikan. Sebagai tokoh kunci, kepala sekolah harus dapat menentukan cara pencapaian tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan secara efektif, sehingga dituntut meningkatkan efektivitas kerjanya.

Namun kenyataannya masih banyak kepala sekolah yang dalam mengelola sekolah terjadi perbedaan dalam melakukan layanan pendidikan di sekolah dilihat dari tanggung jawab, komitmen, kompetensi, inovasi, menyelesaikan masalah, mengakomodir aspirasi, serta menginspirasi sehingga hal ini dapat menjadi indikasi bahwa tata kelola itu masih lemah.

Kondisi pendidikan di Provinsi DKI Jakarta kenyataannya masih ada permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan, hal ini ditandai dengan masih banyaknya sekolah-sekolah ditingkat SMA Negeri yang tata kelolanya belum baik. Keberhasilan dalam menata tata kelola di SMA Negeri diasumsikan akan dapat memberikan peluang yang lebih besar dalam upaya memberikan layanan pendidikan yang merata, perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing keluaran pendidikan, penguatan tata kelola,

akuntabilitas dan citra publik pendidikan.

Adanya sekolah yang memiliki tata kelola yang sudah dikatakan baik dan masih ada sekolah yang tata kelolanya belum baik sehingga hal inilah yang menyebabkan pandangan dalam masyarakat terhadap sekolah-sekolah dalam hal ini SMA Negeri yang ada di Jakarta menjadi berbeda, ada sekolah yang dianggap sekolah unggulan/ favorit dan ada sekolah yang dianggap sekolah bukan unggulan/ bukan favorit yang menimbulkan peminatan pada saat pemilihan sekolah hanya tertuju pada sekolah-sekolah tertentu saja. Pandangan masyarakat yang berbeda-beda terhadap kondisi sekolah-sekolah dalam hal ini SMA Negeri mestinya tidak terjadi mengingat intervensi pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif sama baik dari sisi rekrutmen sumber daya manusia, pendanaan, dan daya dukung lainnya. Pandangan masyarakat terhadap sekolah unggulan/ favorit dan bukan sekolah unggulan/ bukan favorit mengakibatkan masyarakat pada saat memilih sekolah hanya bertumpu pada sekolah-sekolah tertentu dan ini menyebabkan menjadi permasalahan yang kerap kali muncul dari tahun ke tahun terutama pada saat penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Di Provinsi DKI Jakarta sendiri masih terdapat cara pandang masyarakat tentang adanya sekolah unggulan/favorit yang dulunya termasuk rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Sekolah-sekolah ini masih dijadikan tujuan oleh mayoritas masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang diharapkan cara pandang masyarakat terhadap sekolah favorit/unggulan berubah sehingga masyarakat akan menganggap semua sekolah di Provinsi DKI Jakarta memiliki kualitas yang setara bagusnya.

Berikut sekolah-sekolah yang dianggap favorit oleh masyarakat

Tabel 1.1 Peminat 10 SMA Negeri Favorit Oleh Masyarakat

No	SEKOLAH	2019		2020		2021		2022	
		Daya Tampung	Peminat						
1	SMA NEGERI 3	324	1.552	320	3.188	324	2.927	316	2.556
2	SMA NEGERI 8	360	1.312	312	2.840	324	3.412	349	2.521
3	SMA NEGERI 13	288	1.618	288	3.036	288	3.853	275	2.836
4	SMA NEGERI 21	252	1.125	281	2.429	288	3.102	277	2.219
5	SMA NEGERI 28	252	1.265	251	3.207	252	4.345	242	2.939
6	SMA NEGERI 81	324	1.294	252	2.184	252	2.781	243	2.086
7	SMA NEGERI 78	396	1.562	396	3.825	396	4.567	387	3.318
8	SMA NEGERI 70	360	1.669	360	3.622	360	3.783	350	3.025
9	SMA NEGERI 68	288	1.440	288	2.949	288	2.371	275	2.253
10	SMA NEGERI 61	216	1.482	216	2.624	216	2.256	210	2.121

Sumber : Pusatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Karena ada beberapa sekolah yang diunggulkan/ difavoritkan masyarakat maka ada juga sekolah yang kurang diminati masyarakat, padahal seharusnya dengan kondisi sekolah negeri yang ada di Provinsi DKI Jakarta semuanya diunggulkan/ difavoritkan.

Berikut sekolah-sekolah yang peminatnya rendah :

Tabel 1.2. SMA Negeri Peminat Rendah

No	SEKOLAH	2019		2020		2021		2022	
		Daya Tampung	Peminat						
1	SMA NEGERI 69	216	909	207	765	216	642	244	772
2	SMA NEGERI 111	216	1.015	144	1.972	144	2.102	142	1.780
3	SMA NEGERI 2	252	1.105	179	1.983	180	2.145	209	1.892
4	SMA NEGERI 12	216	1.115	142	2.013	216	2.168	213	2.037
5	SMA NEGERI 21	252	1.125	210	2.113	216	2.235	212	2.084
6	SMA NEGERI 89	288	1.136	252	2.184	216	2.245	243	2.086
7	SMA NEGERI 14	252	1.174	211	2.217	180	2.250	210	2.121
8	SMA NEGERI 87	252	1.215	180	2.313	216	2.256	172	2.126
9	SMA NEGERI 91	216	1.216	252	2.389	216	2.318	200	2.137
10	SMA NEGERI 26	216	1.225	281	2.429	144	2.354	213	2.214

Sumber : Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Mengamati kondisi faktual di lapangan ternyata sekolah-sekolah yang diminati masyarakat itu mempunyai keterserapan di Perguruan Tingginya tinggi di atas 70 % seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.3. Persentase keterserapan SMA Negeri di Perguruan Tinggi Negeri

NO	SEKOLAH	PRESENTASE KETESERAPAN PERGURUAN TINGGI		
		2019	2020	2021
1	SMA Negeri 3	27,81	73,15	86,29
2	SMA Negeri 8	61,94	95,64	99,72
3	SMA Negeri 13	44,56	73,61	93,03
4	SMA Negeri 21	50,79	96,52	100
5	SMA Negeri 28	53,81	91,67	87,69
6	SMA Negeri 81	62,84	97,61	92,88
7	SMA Negeri 78	53,75	97,00	97,64
8	SMA Negeri 70	37,04	78,83	93,88
9	SMA Negeri 68	57,83	88,00	91,35
10	SMA Negeri 61	46,94	90,74	94,44
11	SMA NEGERI 69	7,36	8,39	6,29
12	SMA NEGERI 111	5,65	5,63	27,96
13	SMA NEGERI 2	13,89	7,97	44,44
14	SMA NEGERI 12	24,30	18,60	93,98
15	SMA NEGERI 21	17,46	15,49	97,24
16	SMA NEGERI 89	15,74	22,33	46,34
17	SMA NEGERI 14	15,94	13,60	67,86
18	SMA NEGERI 87	13,02	8,37	65,08
19	SMA NEGERI 91	15,08	5,61	76,39
20	SMA NEGERI 26	23,15	21,30	78,60

Sumber : Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022

Peneliti mencermati bahwa ada permasalahan yang terjadi pada tata kelola di satuan pendidikan di setiap sekolah negeri, sehingga harapannya jika semua sekolah mempunyai tata kelola yang baik secara kualitas dan setara dalam memberikan layanan pendidikan maka masyarakat mau sekolah dimanapun tetap sama.

Peneliti mencermati adanya kondisi dimana jika melihat beberapa sekolah yang mempunyai keterserapan di Perguruan Tinggi Negeri tinggi dan peminatnya sangat banyak dibandingkan dengan daya tampung di sekolah dapat diduga bahwa di sekolah-sekolah tersebut tidak ada permasalahan dalam tata kelola, namun bagi sekolah-sekolah yang masih mempunyai keterserapan di Perguruan Tinggi Negeri rendah dan peminatnya tidak sebanyak sekolah-sekolah yang memiliki keterserapan di Perguruan Tinggi Negeri maka diduga sekolah-sekolah tersebut mempunyai permasalahan dalam tata kelola.

Melihat adanya masalah yang terjadi pada tata kelola yang menyebabkan kualitas layanan di sekolah yang berbeda-beda untuk menguji dan membuktikan hal tersebut peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul **pengaruh peserta didik baru (PPDB), pembiayaan, pelatihan dan kepemimpinan transformasional terhadap tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta**. Penelitian ini diharapkan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tata kelola di SMA Negeri.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan Permendikbud No 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK bahwa pelaksanaan PPDB itu dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan namun masih terdapat masalah dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) diantaranya : Masih terdapat cara pandang terhadap sekolah unggulan/favorit dan sekolah bukan unggulan/bukan favorit di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan mutu antara satu sekolah dengan yang lainnya; Adanya keluhan orang tua terhadap sistem PPDB; Aturan teknis tingkat provinsi/kota/kabupaten, sarana dan prasarana, hingga jumlah petugas yang terbatas; Jangka waktu yang terbatas atau sempit sampai dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Hal yang tidak kalah penting dalam upaya tata kelola sekolah adalah unsur pembiayaan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah juga telah menerbitkan berbagai regulasi untuk menetapkan standar pembiayaan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009, pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Seharusnya pembiayaan pendidikan dilakukan secara transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, proses p-erencanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan ketepatan waktu secara efektif dan efisien. Setelah dilaksanakan, pelaporannya harus tepat sasaran dan tepat pembiayaan, sehingga pembiayaan yang dilakukan di SMA Negeri Provinsi DKI Jakarta secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab serta berkeadilan dan berkepatuhan.

Pelatihan merupakan salah satu kegiatan manajemen dalam bidang ketenagaan di sekolah, juga merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Pelatihan yang dilaksanakan harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan, penentuan sasaran, identifikasi isi dan penetapan program, pelaksanaan program, prinsip-prinsip pembelajaran yang bermanfaat serta penilaian pelaksanaan program.

Hal lain yang dapat mempengaruhi tata kelola di SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta adalah kepemimpinan transformasional dari kepala sekolah, karena seyogyanya perilaku kepala sekolah dalam mengarahkan dan mempengaruhi aktifitas anggota kelompok dalam melaksanakan tugas dalam organisasi secara teoritis dapat melalui unsur *charisma*, *considerant individual*, dan stimulasi intelektual dimana dari ketiga hal tersebut seorang kepala sekolah dapat menciptakan visi dan misi, menginspirasi, dapat mengarahkan, dan menjadi model dalam berperilaku intelektual.

1. Bagaimanakah sistem pengelolaan sekolah yang diterapkan pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?
2. Bagaimanakah sistem pengelolaan sekolah yang dikembangkan pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi determinan pengelolaan sekolah pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?
4. Bagaimanakah perilaku unsur-unsur pengelola sekolah pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?
5. Apakah terdapat pengaruh geografis sekolah terhadap pengelolaan SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?

6. Apakah terdapat pengaruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap pengelolaan SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?
7. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan terhadap pengelolaan SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?
8. Apakah terdapat pengaruh pelatihan terhadap pengelolaan SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?
9. Apakah terdapat pengaruh inovasi kepala sekolah terhadap pengelolaan SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?
10. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pengelolaan SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?
11. Apakah terdapat pengaruh penerimaan peserta didik baru (PPDB), pembiayaan, pelatihan dan kepemimpinan transformasional terhadap pengelolaan SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta ?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan mengingat keterbatasan waktu peneliti, berdasarkan latar belakang peneliti membatasi penelitian ini dengan pengaruh penerimaan peserta didik, pembiayaan, pelatihan dan kepemimpinan transformasional. Jika faktor-faktor dapat dikendalikan, maka diharapkan tata kelola di SMA Negeri akan memiliki kesetaraan, sehingga disparitas atau kesenjangan tata kelola antar sekolah dapat dihindari, sehingga masyarakat akan memperoleh kepuasan yang setara di seluruh SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tata kelola di SMA Negeri Provinsi DKI Jakarta, diantaranya : penerimaan peserta didik, pembiayaan, pelatihan dan kepemimpinan transformasional. Untuk melihat apakah adanya pengaruh dari faktor-faktor tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai **pengaruh penerimaan peserta didik baru (PPDB), pembiayaan, pelatihan dan kepemimpinan transformasional terhadap tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh langsung penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh langsung pembiayaan terhadap tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh langsung pelatihan terhadap tata kelola SMANegeri di Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh langsung kepemimpinan transformasional dengan tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta?
5. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap tata kelola melalui kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta?
6. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung pembiayaan terhadap tata kelola melalui kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta?
7. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap tata kelola melalui kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta?
8. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap tata kelola melalui pembiayaan dan kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta?
9. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap tata kelola melalui pembiayaan dan kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta?
10. Apakah dari hasil penelitian ini dapat mengkonstruksi model tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta berbasis kualitas dan kesetaraan ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh langsung penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.
2. Menganalisis pengaruh langsung pembiayaan terhadap tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

3. Menganalisis pengaruh langsung pelatihan terhadap tata kelola pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.
4. Menganalisis Pengaruh langsung antara kepemimpinan transformasional dengan tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.
5. Menganalisis pengaruh tidak langsung penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap tata kelola melalui kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.
6. Menganalisis pengaruh tidak langsung pembiayaan terhadap tata kelola melalui kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.
7. Menganalisis pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap tata kelola melalui kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.
8. Pengaruh tidak langsung penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap tata kelola melalui pembiayaan dan kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.
9. Menganalisis pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap tata kelola melalui pembiayaan dan kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.
10. Mengkonstruksi model berbasis tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta berbasis kualitas dan kesetaraan.

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini berguna dari aspek praktis dan teoritis sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih secara praktis sebagai berikut :
 - a. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)
 Dalam menyusun regulasi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB), pembiayaan, pelatihan dan pendampingan kepemimpinan transformasional kepala sekolah mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi aspek nasional dan karakteristik pemerintah daerah.
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 Dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta dapat menyelaraskan

dengan regulasi dari Kemendikbudristek dengan karakteristik sekolah - sekolah yang ada di Provinsi DKI Jakarta serta kondisi di Provinsi DKI Jakarta khususnya penerimaan peserta didik baru (PPDB), pembiayaan, pelatihan dan kepemimpinan transformasional untuk dapat mewujudkan tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, perlu keterlibatan secara berjenjang mulai dari Suku Dinas Pendidikan hingga satuan pendidikan.

c. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP)

Dalam melaksanakan Penjaminan dan Peningkatan mutu pada Pendidikan menengah di provinsi Jakarta, BPMP Melaksanakan pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu di sekolah dapat memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih khususnya dalam bidang manajemen pendidikan terutama yang menyangkut bagaimana mewujudkan tata kelola yang baik di lingkungan SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga menambah referensi studi yang berhubungan dengan pengaruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) terhadap tata kelola melalui pembiayaan dan kepemimpinan transformasional pada SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

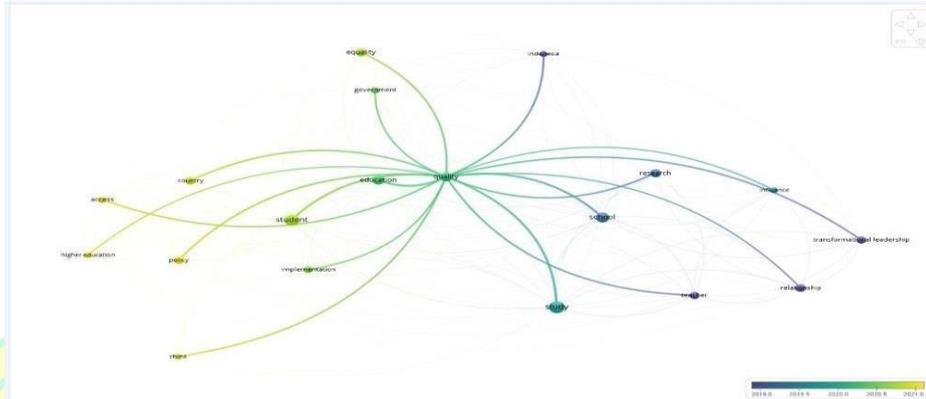
G. Kebaruan Penelitian

Nilai Kebaruan yang merupakan pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembuktian adanya pengaruh penerimaan peserta didik baru (PPDB), pembiayaan, pelatihan dan kepemimpinan transformasional terhadap tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

Penelitian pengaruh penerimaan peserta didik baru (PPDB), pembiayaan, pelatihan dan kepemimpinan transformasional terhadap tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta dilakukan berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Penjelasan secara ilmiah atau akademik mengenai pengaruh penerimaan peserta didik baru (PPDB), pembiayaan, pelatihan dan kepemimpinan transformasional terhadap tata kelola SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta akan dikuatkan dengan *Vos Viewer* untuk melihat area penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam. Dilihat dari data kajian

internasional melalui laman *ScienceDirect.com* berjumlah 100 artikel jurnal dengan tema, yang mirip dan *Google Scholar.com* berjumlah 69 jurnal nasional, maka diperoleh hasil seperti gambar 1.1 dibawah ini



Gambar 1.1 Vos Viewer penerimaan peserta didik baru (PPDB) , Pembiayaan, Pelatihan dan kepemimpinan Transformasional terhadap tata kelola

Berikut berapa Jurnal yang dianalisa sesuai dengan tema dalam penelitian ini :

Penelitian James Coleman berjudul “*Quality and Equality Quality and Equality in American Education: Public and Catholic Schools* “, Kesimpulan hasil penelitian dibidang kualitas dan Kesetaraan Gender : Adanya temuan disekolah-sekolah katolik pencapaian akademik lebih tinggi di banding sekolah swasta bidang kognitif dasar seperti membaca, kosa kata, matematika; Ditemukan ada kesempatan yang lebih luas bagi siswa siswa sekolah katolik dan sekolah swasta dalam melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi; Penyebaran ras di sekolah katolik lebih sedikit siswanya yang berkulit hitam dibanding dengan sekolah swasta; Sekolah yang lebih mahal belum tentu dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dilihat dari sekolah katolik dengan sekolah swasta; Kualitas antara sekolah katolik dan sekolah swasta relatif masih samar kurang jelas.

“*Equality of Educational Equality of educational opportunities at public primary schools in Argentina Education*” by Cecilia Adrogué, penelitian ini menilai tingkat kesetaraan kesempatan pendidikan di seluruh sekolah dasar negeri Argentina. Temuan utama adalah bahwa ada ketidaksetaraan antara yurisdiksi, tetapi ketidaksetaraan yang lebih besar di dalamnya, menunjukkan adanya masalah serius dalam distribusi sumber daya di tingkat sub-nasional. Mengikuti rekomendasi dari literatur khusus, perkiraan

kualitas sekolah dan perbedaan ukuran telah dihitung dalam kesempatan pendidikan. Sementara perbedaan sekolah ditemukan di seluruh provinsi, perbedaan yang lebih besar ditemukan di antara sekolah umum yang terletak di dalam provinsi, yang bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan dasar. Yang paling penting, ketidaksetaraan di antara sekolah umum ditemukan terkait dengan faktor-faktor yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial.

“Findings of quality management studies in primary and secondary education: a systematic literature review” by Sheila Aikman Anjum Halai , Jolly Rubagiz Penelitian berfokus pada hal yaitu manusia sebagai modal, kesetaraan kekuasaan dan hak asasi manusia, kritik pascakolonial, pembangunan sebagai aksi sosial untuk pemberdayaan. Hasilnya menunjukkan hubungan antara gagasan sempit dan terbatas tentang pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender sebagai jaminan bahwa anak perempuan dapat mengakses sekolah dan berpartisipasi di sekolah dengan cara yang sama seperti anak laki-laki. Sementara ini menunjukkan keadilan, pendekatan lain telah menunjukkan bahwa kesamaan sering dapat berarti ketidaksetaraan karena struktur institusional dan distribusi kekuasaan yang tidak merata secara historis.

“Findings of quality management studies in primary and secondary education: a systematic literature review” by Nancy Bouranta and Evangelos Psomas temuan studi QM yang disajikan dalam 133 artikel yang diulas dikelompokkan ke dalam 43 tema , pada gilirannya, menjadi 6 kategori besar, yaitu praktik manajemen, karakteristik sekolah, guru, pemangku kepentingan, pemerintah, dan murid. Analisis juga mengungkapkan tema yang dapat dicirikan sebagai "vital" dan "berguna." Implikasi praktis peneliti dan manajer sekolah dapat mempertimbangkan temuan studi QM di pendidikan dasar dan menengah serta tema prioritas tinggi untuk desain studi masa depan *Development of Teacher Research Competency Training*.

“Educational guidance for functional visual diversity in Nicaragua. Design and evaluation of a teacher-training program” by Martín, Valero, Buils , Miedes Artikel ini memaparkan proses desain dan implementasi program pelatihan untuk guru yang mengajar siswa dengan keragaman fungsional visual (VFD), dengan mempertimbangkan kebutuhan guru baik dalam pelatihan maupun dalam penyediaan sumber daya di Nikaragua. Untuk memverifikasi program, desain eksperimen semu dilakukan dengan kelompok kontrol pretest dan posttest non-ekuivalen. Kelompok eksperimen

mendapatkan pelatihan sedangkan kelompok kontrol tidak mendapatkan pelatihan. Evaluasi hasil yang diperoleh setelah penerapan program dilakukan melalui dua instrumen yaitu angket efikasi dan angket kepuasan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol setelah penerapan program ($Z = 4,383$; $p = 0,000$) mendukung kelompok eksperimen.

“The Roles of Teacher-Training Program and Student Teacher’s Self -Regulation in Development Competency in Science” by Mohamad Syarif Sumantri, Prayuningtyas A.W, Reza Rachmadtullah, Ina Magdalena, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh : Program pelatihan guru; Regulasi diri siswa guru; dan Interaksi antara program pelatihan guru dan regulasi diri terhadap kompetensi mengajar IPA kalangan guru siswa sekolah dasar. Penelitian dilakukan pada program pendidikan guru sekolah dasar dengansampel 44 siswa guru. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: pertama, siswa guru yang berpartisipasi dalam program pengajaran reflektif menunjukkan kompetensi pengajaran sains yang lebih besar daripada mereka yang berpartisipasi dalam pengajaran program mikro; kedua, kompetensi mengajar IPA siswa guru dengan tingkat regulasi diri yang tinggi ditingkatkan dengan program pengajaran reflektif; ketiga, siswa guru dengan tingkat regulasi diri yang rendah diuntungkan dari microteaching program; keempat, ada interaksi antara program pelatihan guru dan pengaturan diri yang memiliki efek berbeda pada kompetensi mengajar IPA di SD).

“*Effect of Principal’s Transformational Leadership Style on Teacher Performance*” (by Rahayu et al., 2019), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru. Metode penelitian: analisis deskriptif, pendekatan kuantitatif, teknik analisis korelasi product moment, determinasi dan regresi. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah guru di dua SD di Kota Bogor Timur yang berjumlah 54 orang, dengan jumlah sampel 34 responden dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kepemimpinan transformasional dengan kinerja mengajar guru. Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja guru adalah meningkatkan dimensi stimulasi intelektual dan kepekaan individu kepala sekolah dan partisipasi guru dalam pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru.

“*Inequalities in Presence of a School Funding Formula: The 15-year Free Education Program in Thailand*” by Bernard Gauthiera, Chaiyuth Punyasavatsut.

Makalah ini mengkaji kapasitas formula pendanaan “Program pendidikan gratis 15 tahun” (*Free Education Programe*) di Thailand pada mengurangi ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya di seluruh sekolah dasar dan menengah dan mempersempit pembelajaran ketidaksetaraan hasil.

Analisis menggunakan data dari survei sektor pendidikan yang dilakukan pada tahun 2015-2016 yang meliputi : 240 sekolah umum, 2463 guru dan 2500 rumah tangga. Kami menemukan bahwa sementara FEP berkontribusi pada pengurangan disparitas sumber daya per siswa lintas sekolah, formula pendanaan tidak cukup progresif dan cukup besar untuk mengimbangi kontribusi pemerintah daerah dan sektor swasta, atau secara signifikan mengurangi kesetaraan dalam hasil pembelajaran di seluruh masyarakat.

Dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya belum banyak yang membahas mengenai tata kelola yang menghubungkan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB), pembiayaan, pelatihan dan kepemimpinan transformasional terutama di jenjang SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta.

